

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
SATUAN KERJA : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
PROPINSI : (25) PAPUA
LOKASI : (51) KOTA JAYAPURA

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2025			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		87,730,000		87,730,000
	Sasaran Program : Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan				
	Indikator Kinerja Program :				
04	Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu				
04.01	Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu				
04.02	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer				
04.03	Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer				
04.04	Persentase Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer				
04.05	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer				
04.06	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Militer				
04.07	Persentase Perkara yang Berhasil Diputus dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer				
04.08	Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer				
04.09	Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer				
04.10	Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
04.11	Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
04.12	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
04.13	Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
04.14	Persentase Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
04.15	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
04.16	Persentase Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
04.17	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
04.18	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau				
07	Indikator Kinerja Program :				
07.01	Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer				
07.02	Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
SATUAN KERJA : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
PROPINSI : (25) PAPUA
LOKASI : (51) KOTA JAYAPURA

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2025			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sasaran Program : Indikator Kinerja Program : 07.03 Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang optimal 10 Indikator Kinerja Program : 10.01 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer 10.02 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 10.03 Persentase Pengguna Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani 1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara				
			87,730,000		87,730,000
	Indikator Kinerja Kegiatan : 01 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat 02 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat 03 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Salinan Putusan 04 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyediaan/Pengiriman 05 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman 06 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Putusan Pengadilan yang 07 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perkara yang Menggunakan 08 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Permohonan 01 Jumlah Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung 02 Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya 01 Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan 01 Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan 01 Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan 01 Jumlah Kegiatan Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan 1059.AEA Koordinasi [Base Line] 25.51 KOTA JAYAPURA <i>Indikator KRO</i> 002 Dukungan Penyelesaian Perkara <i>Indikator RO</i> 01 Jumlah Kegiatan Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 1059.BCA Perkara Hukum Perseorangan [Base Line] 25.51 KOTA JAYAPURA <i>Indikator KRO</i> 001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara <i>Indikator RO</i> 01 Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara 1059.QBA [SBK] Layanan Bantuan Hukum Perseorangan [Base Line] 25.51 KOTA JAYAPURA <i>Indikator KRO</i> 001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
		1.00 kegiatan	12,000,000		12,000,000
		1.00 kegiatan	12,000,000		12,000,000
		1.00 Perkara, Berkas Perkara	405,000		405,000
		1.00 Perkara	405,000		405,000
		96.00 Orang	33,000,000		33,000,000
		96.00 Orang	33,000,000		33,000,000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
SATUAN KERJA : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
PROPINSI : (25) PAPUA
LOKASI : (51) KOTA JAYAPURA

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2025			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
02 01 1059.QCA	Indikator RO				
	Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum				
	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
	Perkara Hukum Perseorangan [Base Line] 25.51 KOTA JAYAPURA	1.00 Perkara, Berkas Perkara	42,325,000		42,325,000
002	Indikator KRO				
	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	1.00 Perkara	42,325,000		42,325,000
	Indikator RO				
01	Jumlah Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara				

Jayapura, 1 Januari 2025

FEFI YANTI THOMAS, SE
NIP 197903102006042002

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (005) **MAHKAMAH AGUNG**
UNIT ORG : (05) **Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)**
PROGRAM : (005.05.BF) **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**
SATUAN KERJA : (539139) **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**
PROPINSI : (25) **PAPUA**
LOKASI : (51) **KOTA JAYAPURA**

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2025				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		87,730,000		87,730,000		
	<u>Sasaran Program :</u>						
04	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan						
	<u>Indikator Kinerja Program :</u>						
04.01	Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu						
04.02	Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu						
04.03	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer						
04.04	Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer						
04.05	Persentase Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer						
04.06	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer						
04.07	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Militer						
04.08	Persentase Perkara yang Berhasil Diputus dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer						
04.09	Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer						
04.10	Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer						
04.11	Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
04.12	Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
04.13	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
04.14	Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
04.15	Persentase Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
04.16	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
04.17	Persentase Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
04.18	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
07	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau						
	<u>Indikator Kinerja Program :</u>						
07.01	Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer						
07.02	Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
07.03	Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan						
10	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang optimal						
	<u>Indikator Kinerja Program :</u>						
10.01	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer						
10.02	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di						

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (005)

UNIT ORG : (05)

PROGRAM : (005.05.BF)

SATUAN KERJA : (539139)

PROPINSI : (25)

LOKASI : (51)

MAHKAMAH AGUNG

Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

PAPUA

KOTA JAYAPURA

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2025				SD/ CP	KPI/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
10.02 10.03 1059	Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Persentase Pengguna Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (Fungsi/Sub Fungsi: 03.04)		87,730,000		87,730,000		
1059.AEA	Koordinasi [Base Line]	1 kegiatan	12,000,000		12,000,000		KD
	Lokasi : KOTA JAYAPURA						
1059.AEA.002	Dukungan Penyelesaian Perkara	1.0 kegiatan	12,000,000		12,000,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		12,000,000		12,000,000		
051	Pelaksanaan Pengamanan Sidang		12,000,000		12,000,000		
1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan [Base Line]	1 Perkara, Berkas Perkara	405,000		405,000		KD
	Lokasi : KOTA JAYAPURA						
1059.BCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.0 Perkara	405,000		405,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		405,000		405,000		
051	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara		405,000		405,000		

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (005)

UNIT ORG : (05)

PROGRAM : (005.05.BF)

SATUAN KERJA : (539139)

PROPINSI : (25)

LOKASI : (51)

MAHKAMAH AGUNG

Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

PAPUA

KOTA JAYAPURA

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2025				SD/ CP	KPI/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
1059.QBA	[SBK] Layanan Bantuan Hukum Perseorangan [Base Line]	96 Orang	33,000,000		33,000,000		KD
1059.QBA.001	Lokasi : KOTA JAYAPURA						
	Layanan Pos Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	96.0 Orang	33,000,000		33,000,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		33,000,000		33,000,000		
051	Pos Bantuan Hukum		33,000,000		33,000,000		
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan [Base Line]	1 Perkara, Berkas Perkara	42,325,000		42,325,000		KD
1059.QCA.002	Lokasi : KOTA JAYAPURA						
	Perkara Yang Dilayani Melalui Sidang Di Luar Gedung Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1.0 Perkara	42,325,000		42,325,000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		42,325,000		42,325,000		
051	Sidang di luar Gedung Pengadilan		42,325,000		42,325,000		

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
PROGRAM : (005.05.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
SATUAN KERJA : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
PROPINSI : (25) PAPUA
LOKASI : (51) KOTA JAYAPURA

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2025				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

TOTAL	2025	2024
RM	87,730,000	
PLN	0	
RMP	0	
PNP	0	
BLU	0	
HIBAH	0	
PDN	0	
SBSN	0	
	87,730,000	

Jayapura, 1 Januari 2025

FEFI YANTI THOMAS, SE
NIP 197903102006042002

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BAGIAN-C

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
SATUAN KERJA : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
PROPINSI : (25) PAPUA
LOKASI : (51) KOTA JAYAPURA

Halaman : 1

KODE	KEGIATAN/ SUMBER PENDAPATAN/ AKUN PENDAPATAN	JUMLAH 2025	ALOKASI TA 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	20,819,000	20,819,000
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata PNBP	20,819,000	20,819,000
	FUNGSIONAL	20,819,000	20,819,000
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1,600,000	1,600,000
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	3,270,000	3,270,000
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	15,949,000	15,949,000

TOTAL	TA 2025
PERPAJAKAN	0
PNBP	20,819,000
1. UMUM	0
2. FUNGSIONAL	20,819,000

Jayapura, 1 Januari 2025

FEFI YANTI THOMAS, SE
NIP 197903102006042002